

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

**La Ode Farum**

Universitas Halu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: [laodefarum@yahoo.com](mailto:laodefarum@yahoo.com)

<p><b>Info Article</b>          Received :          01 April 2022          Revised :          03 Mei 2022          Accepted :          01 Juli 2022          Publication :          30 Juli 2022</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>This study aims to Know the Growth of Sources of State Revenues, Contributions from Sources of State Revenues, State Revenue Performance seen from Sources of State Revenues, and Efficient use of State Revenues and Expenditures. The benefits of this research are to provide information to readers about the state budget for income and expenditure, increase knowledge and information used in writing this research and can be a reference material that can provide a comparison in conducting research in the same field. The type of data used in this study is secondary data in the form of Time Series data. Secondary data is data obtained through prantara or media indirectly while time series data is a series of variable values at one time interval. This study uses descriptive quantitative analysis methods and ratio analysis. The results of this study state that revenues through taxes have contributed to the acceptance of the State, especially Domestic Tax revenues and use of the budget, are still very inefficient, because of the income or funding sources that are smaller than the expenditure made.</i></p>
<p><b>Keywords:</b>          Income.          Expenditure,          Country  <b>Kata Kunci:</b>          Pendapatan,          Belanja, Negara</p>	<p><b>Abstrak:</b> Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pertumbuhan Sumber-Sumber Pendapatan Negara, Kontribusi Dari Sumber Sumber Pendapatan Negara, Kinerja Pendapatan Negara yang dilihat dari Sumber-Sumber Pendapatan Negara, dan Efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai anggaran pendapatan dan belanja Negara, menambah ilmu pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dan dapat menjadi bahan referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data <i>Time Series</i>. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media prantara atau secara tidak langsung sedangkan data time series yaitu serangkaian nilai-nilai variable pada satu interval waktu. Penelitian ini menggunakan Metode analisis Deskriptif Kuantitatif dan Analisis Rasio. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerimaan melalui pajak telah memberikan kontribusidalam penerimaan Negara khususnya penerimaan Pajak Dalam Negeri dan penggunaan anggaran, masih sangat tidak efisien, karna dari pendapatan atau sumber pendanaan yang ada lebih kecil dari belanja yang di lakukan.</p>
<p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	

## **PENDAHULUAN**

Negara merupakan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan di organisir oleh pemerintah Negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan. Oleh karena itu dalam kehidupan tata Negara pemerintah memiliki fungsi dan peran penting di dalam mengatur Negara dimana pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan pembuat kebijakan didalam mengorganisir ataupun mengatur pemerintahan. Didalam mengatur dan mengorganisir kebijakan dan program-program pemerintah agar berjalan di perlukan anggaran (budget).

Budget Menurut John F. Due dalam Tjandra (2006) bahwa budget adalah rencana keuangan untuk satu periode waktu tertentu. Government budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang di usulkan dan penerimaan untuk masa mendatang, bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. (kementrian keuangan 2013)

Unsur-unsur definisi John F. Due menyangkut hal hal berikut : (1) anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun ke tahun yang sudah lalu, (2) jumlah yang di usulkan untuk tahun tang akan dating, (3) jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan dan (4) rencana keuang tersebut untuk satu periode tertentu.

Di Indonesia budget tersebut di kenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah Negara yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memuat hak dan kewajiban Negara yang diamanatkan Undang Undang No. 7 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 2, bahwa hak Negara meliputi pungutan pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman dan kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan kemampuan Negara dalam menghimpun penerimaan pendapatan Negara yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dalam menjalankan mandat otonomi daerah.

Penerimaan Negara merupakan dana yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendanai seluruh aktivitas pemerintah, seperti untuk penyediaan barang dan jasa publik. Penerimaan pemerintah dapat berasal dari berbagai

sumber, seperti: melalui pendapatan pajak dan non pajak, hibah serta melalui skema pembiayaan. Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Rahmanta dalam surya leksmana ikhsan dan amir, 2016 bahwa Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek dan obyek pajak.

Tidak terealisasinya penerimaan Negara, juga bersumber dari faktor lain, seperti halnya dalam penelitian Amalia Wijayanti (2015) Tentang Analisis Penerimaan Pajak Indonesia Pendekatan Ekonomi Makro efek jangka panjang dan jangka pendek variabel-variabel ekonomi makro, berupa produk domestik bruto (PDB) riil, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara, terhadap penerimaan pajak Indonesia selama periode 1976-2013, pengaruh masing-masing variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang maupun jangka pendek bahwa penerimaan pajak Indonesia dipengaruhi oleh variabel PDB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan belanja negara, sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia dalam model jangka panjang. Pada model jangka pendek penerimaan pajak Indonesia hanya dipengaruhi oleh belanja negara, sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia. Pada estimasi model jangka pendek juga diperoleh nilai koefisien bentuk koreksi kesalahan (Error Correction Term/ECT) sebesar 0,221 yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penerimaan pajak yang terjadi pada jangka panjang akan dikoreksi sebesar 22 persen.(Wijayanti 2015)

Berbicara mengenai hokum keuangan Negara, terdapat banyak pengertian keuangan Negara, menurut beberapa para ahli, (Riawan Tjandra 2006) seperti;

1. Menurut M.ichwan dalam Tjandra (2006) bahwa keuangan Negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif yang akan di jalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.
2. Menurut Geodhart dalam Tjandra (2006) bahwa keuangan Negara merupakan keseluruhan undang-undang yang di tetapkan secara periodic yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu

dan menunjukkan alat pembiayaan yang di perlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Unsure-unsur keuangan Negara menurut geodhart meliputi : (1) periodic, (2) pemerintah sebagai pelaksana anggaran (3) pelaksanaan dan penganggaran mencakup 2 wewenang yaitu pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran pengeluaran yang bersangkutan dan (4) bentuk anggaran adalah berupa suatu Undang-Undang. 3. Menurut John F. Due dalam Tjandra (2006) bahwa budget adalah rencana keuangan untuk satu periode waktu tertentu. Government budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang di usulkan dan penerimaan untuk masa mendatang, bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. Unsur-unsur definisi John F. Due menyangkut hal hal berikut; (1) Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun ke tahun yang sudah lalu, (2) Jumlah yang di usulkan untuk tahun tang akan dating, (3) Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan, dan (4) Rencana keuang tersebut untuk satu periode tertentu.

Dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 1 dan 2 bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2003). Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan definisi stipulatif keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek proses dan tujuan. (Riawan Tjandra 2006)

1. Dari sisi objek, bahwa keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang termasuk kegiatan dalam bidang fiscal moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Dari sisi objek, bahwa keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang termasuk kegiatan dalam bidang fiscal moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

3. Dari sisi subjek, keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas, yang dimiliki Negara dan dikuasai oleh pemerintah pusat, daerah, perusahaan Negara/daerah, dan badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan Negara.
4. Dari sisi proses keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian proses yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.
5. dari sisi tujuan, keuangan Negara meliputi meliputi seluruh kegiatan dan hubungan hokum yang berkaitan dengan pemilik dan penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Menurut M. subagio dalam tjandra, (2006) menjelaskan ada beberapa unsur dalam keuangan Negara, yaitu; (1) Kebijaksanaan pemerintah yang tercermin dalam angka angka, (2) Rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran, (3) Memuat data pelaksanaan anggaran 1 tahun lalu, (4) Menunjukkan sector yang diprioritaskan, (5) Menunjukkan maju/mundurnya pencapaian sasaran, dan (6) Merupakan petunjuk bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaannya selama satu tahun mendatang.

Surya Leksmna Ikhsan dan Amri Amir (2016) dalam analisisnya mengenai *Analisis Struktur Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak di Indonesiamenganalisis* apakah pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi (industri), tarif pajak (badan/perusahaan) mempengaruhi rasio pajak Indonesia selama kurun waktu tahun 2000-2014. Oleh karena itu pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi (industri), tarif pajak (badan/perusahaan) berperan penting dalam meningkatkan rasio pajak, dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendapatan per kapita, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) struktur ekonomi (industri), (4) tarif pajak (badan/perusahaan), serta variabel dependen yang digunakan adalah rasio pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder, alat analisis yang digunakan dalam penelitiannya adalah regresi linier berganda dengan metode kuadrat kecil, uji multikolinearitas. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial struktur ekonomi (industri) berpengaruh secarasignifikanterhadap rasio pajak. Sedangkan secara simultan struktur ekonomi (industri) berpengaruh signifikan terhadap rasio pajak.(Ikhsan and Amir 2016).

Permasalahan dalam penelitian mengenai Pertumbuhan Sumber-Sumber Pendapatan Negara, Kontribusi Dari Sumber Sumber Pendapatan Negara, Kinerja Pendapatan Negara Yang Di Lihat Dari Sumber Sumber Pendapatan Negara, dan

efisiensi anggaran pendapatan dan belanja Negara. Penelitian ini menggunakan Metode analisis Deskriptif Kuantitatif dan Analisis Rasio. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerimaan melalui pajak telah memberikan kontribusi dalam penerimaan Negara khususnya penerimaan Pajak Dalam Negeri dan penggunaan anggaran, masih sangat tidak efisien, karna dari pendapatan atau sumber pendanaan yang ada lebih kecil dari belanja yang di lakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Time Series. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media prantara atau secara tidak langsung sedangkan data time series yaitu serangkaian nilai-nilai variable pada satu interval waktu (INTANSARI et al., n.d.).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013-2017 yang di publikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LKPP BPK-RI) melalui situs : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Analisis Dokumen. Analisis Dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi Dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis, yang terbagi menjadi dua bagian yaitu Dokumen Primer dan Dokumen Sekunder. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Dokumen Sekunder, yaitu dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan orang lain.

Penelitian ini menggunakan Metode analisis Deskriptif Kuantitatif dan Analisis Rasio. menurut Sugiyono dalam Mira Intansari *dkk* (2018 : 1) deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (INTANSARI et al., n.d.). Data di analisis dengan menggunakan SPSS 21 dan excel untuk melihat jumlah dan rata-rata dari data yang di analisis.

Dalam penelitian ini, analisis ratio di tujukan untuk menganalisis laju pertumbuhan dan kontribusi serta ratio efisiensi. pertumbuhan dan kontribusi menggunakan rumus Halim, 2004 :163 dalam ofia Dwi Yuliani (2015) (Yuliani, Hidayat, and Topowijono 2015)

$$GLT = \frac{LT_n - LT(n-1)}{LT(n-1)} \times 100$$

Rumus Pertumbuhan penerimaan

Keterangan:

GLT : Pertumbuhan pajak per tahun.

$LT_n$  : Pendapatan pajak daerah tahun tertentu.

$LT(n-1)$  : Pendapatan pajak daerah tahun sebelumnya

$$C = \frac{HR}{LT} \times 100$$

Rumus Kontribusi Pajak

Keterangan

C : Kontribusi

HR : Penerimaan pajak sektoral

LT : Total Pendapatan pajak

Rumus pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut: (Sari, Mintarti, Pattisahusiwa 2018)

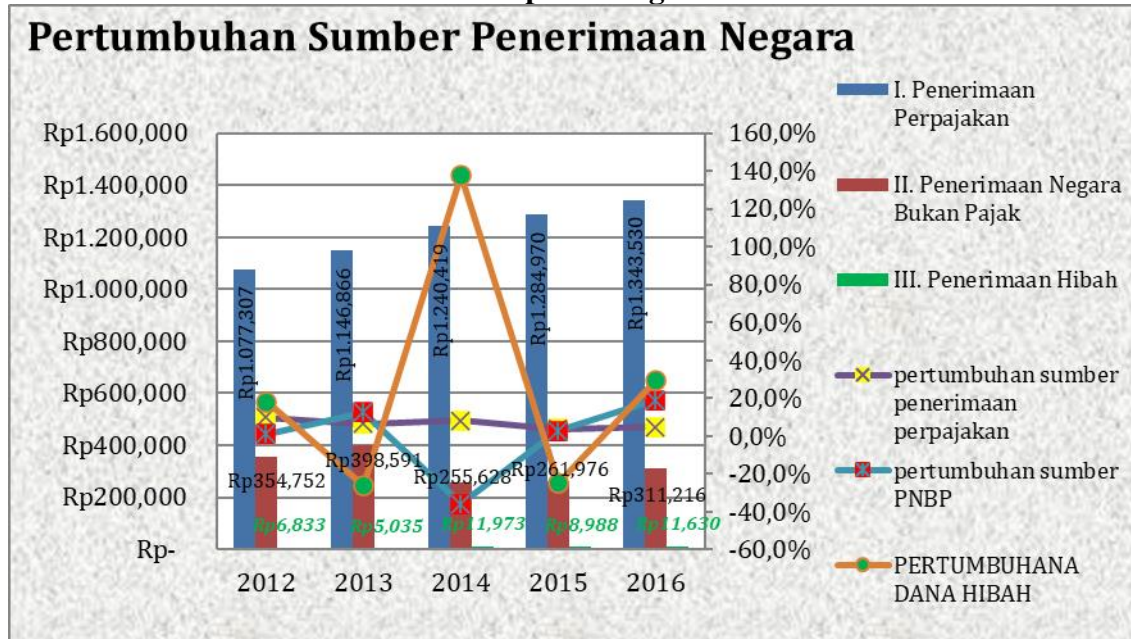
$$Ef = \frac{\text{belanja}}{\text{pendapatan}}$$

Formula perhitungan tingkat efisiensi anggaran

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

**Pertumbuhan Sumber Sumber Pendapatan Negara**



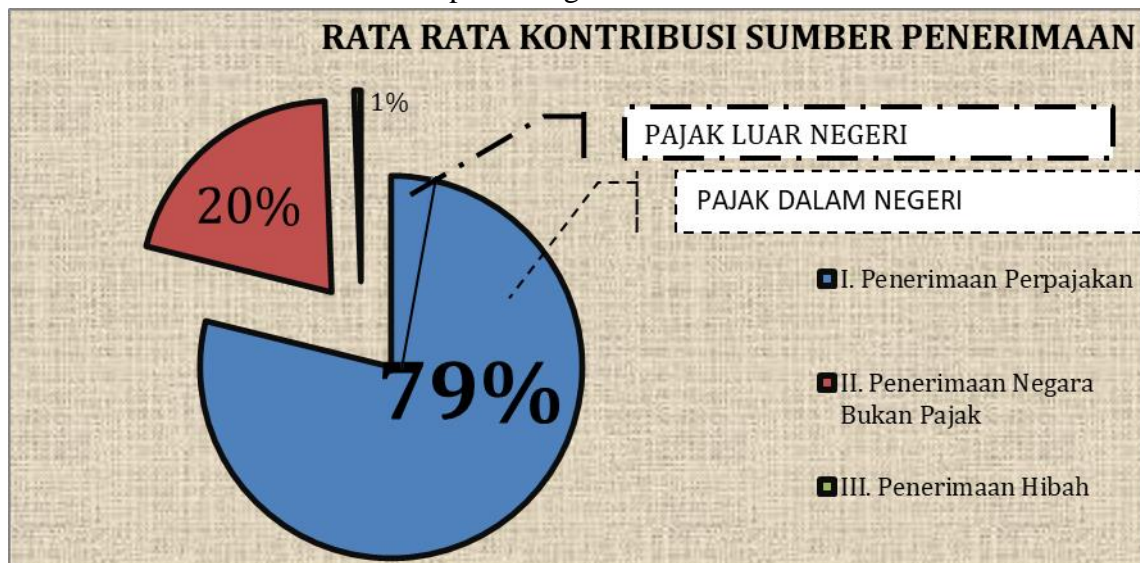
Grafik 1 Pertumbuhan Sumber-Sumber Penerimaan Negara

Dari hasil analisis mendeskripsikan data data bahwa pendapatan Negara 78.86 persen diperoleh melalui penerimaan Perpajakan baik pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar Negeri dengan rata rata pertumbuhan 2013-2017 sebesar 7 persen yang di dominasi oleh pajak dalam Negeri melalui PPN dan PPH yang yang berkontribusi signifikan dalam merealisasikan penerimaan Negara, kecendrungan penerimaan Negara tumbuh dengan tidak stabil dan semakin menurun dari tahun 2013 yang tumbuh 10% menjadi 4% di 2016/2017 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2013-2017 justru tumbuh dengan tren yang negative secara rata rata -0.28 persen dimana tahun 2015 menjadi deficit yang terbesar yang mencapai angka -36 persen di banding tahun 2014 hal ini disebabkan penerimaan Sumber daya Alam dan BUMN di 2015 tidak mengalami pertumbuhan justru merosot sampai -7 persen.

Namun di tahun 2016 menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam mengoptimalkan pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). angka tersebut terus membaik dimana PNBP tumbuh dengan Signifikan dari -36 persen di 2015 menjadi tren positif 4 persen di 2016 hal ini di karenakan adanya perbaikan penerimaan Sumber daya alam dari -7 menjadi -1 dan laba BUMN tumbuh signifikan dari -7 persen menjadi 44 persen yang sangat signifikan. Penerimaan hibah cenderung lebih fluktuatif di bandingkan Penerimaan Perpajakan maupun PNBP. Dari hasil analisis Ratio pertumbuhan hibah hibah sangat tidak stabil, pada tahun 2015 pertumbuhan sangat signifikan mencapai Rp. 11,9 triliun atau (138 %) yang sebelumnya hanya Rp. 5,03

triliun atau (-26%), setelah tumbuh dengan signifikan penerimaan hibah kembali merosot di tahun 2016 yang tumbuh Rp. 8.9 Triliun (-25%).

#### Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Negara 2013-2017



Grafik 2 Rata-Rata Kontribusi Sumber Sumber Penerimaan Negara 2013-2017

Di dalam postur realisasi pendapatan Negara 2013-2017 menunjukkan bahwa rata-rata Penerimaan Perpajakan 2013-2017 memberikan kontribusi terbesar dalam menghimpun pendapatan Negara yaitu 79 persen pendapatan Negara bersumber dari Penerimaan Perpajakan utamanya pajak Dalam Negeri sebesar 97 persen dalam realisasi penerimaan perpajakan bersumber dari pajak dalam negeri dan kontribusi terbesar dalam pajak dalam negeri yang bersumber PPN dan PPH serta Pajak Luar Negeri hanya memberi kontribusi 3 persendari realisasi penerimaan perpajakan.

Selain Penerimaan Perpajakan, sumber lain penerimaan Negara juga bersumber Pendapatan Negara Non Pajak dan Hibah. Pendapatan Non Pajak memberikan kontribusi sebesar 20 persen dalam Penerimaan Negara dan pos penerimaan Negara bukan pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan pendapatan Negara bukan pajak yaitu 45 persen bersumber dari penerimaan Sumber Daya Alam, laba BUMN berkontribusi 13persen, Penerimaan BLU sebesar 12 persen dan 31 persen melalui pendapatan Non Pajak Lainnya pada Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penerimaan Hibah sebesar 1 persen dalam realisasi penerimaan Negara.

Jika melihat dari indikator yang ada, dari sumber pendapatan Negara di sandingkan dengan Pendapatan Negara menunjukkan bahwa, pendapatan Perpajakan sebesar 79 persen menunjukkan sangat baik, hal ini karna kontribusinya yang melebihi 50 persen dari indikator yang ada, sedangkan PNPB menunjukkan Cukup baik karna berkontribusi 20 persen penerimaan Negara.

Tabel 1 Kinerja Pendapatan Negara Dilihat Dari Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Uraian	KINERJA PEENDAPATAN NEGARA					Rata Rata
	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
<b>I. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>74.87%</b>	<b>73.97%</b>	<b>82.25%</b>	<b>82.59%</b>	<b>80.63%</b>	<b>78.86%</b>
1 Pajak Dalam Negeri	95.59%	96.19%	97.18%	97.24%	97.08%	96.66%
2 Pajak Perdagangan Internasional	4.41%	3.81%	2.82%	2.76%	2.92%	3.34%
<b>II. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>24.65%</b>	<b>25.71%</b>	<b>16.95%</b>	<b>16.84%</b>	<b>18.68%</b>	<b>20.57%</b>
1 Penerimaan Sumber Daya Alam	63.82%	60.42%	39.50%	24.77%	35.71%	44.85%
2 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	9.59%	10.11%	14.73%	14.17%	14.11%	12.54%
3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	19.64%	22.01%	31.96%	45.04%	34.97%	30.72%
4 Pendapatan BLU	6.95%	7.45%	13.82%	16.01%	15.21%	11.89%
<b>III. Penerimaan Hibah</b>	<b>0.47%</b>	<b>0.32%</b>	<b>0.79%</b>	<b>0.58%</b>	<b>0.70%</b>	<b>0.57%</b>

Sumber : Pemerintah Negera Indonesia

Untuk melihat Kinerja dari kontribusi sumber-sumbernya, dapat di simpulkan Bahwa secara rata rata pendapatan Negara 2013-2017 sudah sangat baik, dimana

Penerimaan Perpajakan dan PNBPN mencapai 99persen dan hanya 1 persen dari dana Hibah. Akan tetapi, jika di lihat secara mendetail dari sumber-sumber penerimaan Negara, masih ada sumber-sumber yang kinerjanya kurang baik, seperti penerimaan perpajakan dari pajak perdagangan internasional rata-rata hanya 3 persen dari penerimaan perpajakan ini menunjukkan kinerjanya sangat tidak baik di bandingkan pajak dalam negeri yang berkontribusi 96.66 persen terhadap penerimaan Perpajakan yang artinya kinerja penerimaan pajak dalam negeri sudah sangat baik

Kinerja penerimaan Negara Bukan Pajak, ada 4 sumber yaitu penerimaan Sumber daya Alam, Laba BUMN, PNBPN lainnya dan Pendapatan BLU. Dilihat dari sumber sumber PNBPN sumber –sumber yang memiliki kinerja yang baik yaitu dari penerimaan Sumber daya Alam yang berkontribusi 44,85 persen, penerimaan dari laba BUMN dan Pendapatan BLU masih Kurang baik dan PNBPN lainnya sudah cukup baik dengan kontribusinya 30,72 persen dari penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Tabel 2 Efisiensi Anggaran**  
APBN 2013-2017 (Triliunan)

PERIODE	2013	2014	2015	2016	2017
<b>PENDAPATAN</b>	Rp 1.439	Rp 1.551	Rp 1.508	Rp 1.556	Rp 1.666
<b>BELANJA</b>	Rp 1.651	Rp 1.777	Rp 1.807	Rp 1.864	Rp 2.007
<b>DEFISIT</b>	<b>Rp 212</b>	<b>Rp 227</b>	<b>Rp 298</b>	<b>Rp 308</b>	<b>Rp 341</b>
<b>ANGGARAN</b>	14,71%	14,62%	19,79%	19,82%	20,46%
<b>EFISIENSI</b>	114,71%	114,62%	119,79%	119,82%	120,46%
<b>ANGGARAN</b>					

Berdasarkan Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efisien anggaran belanja adalah sebagai berikut;

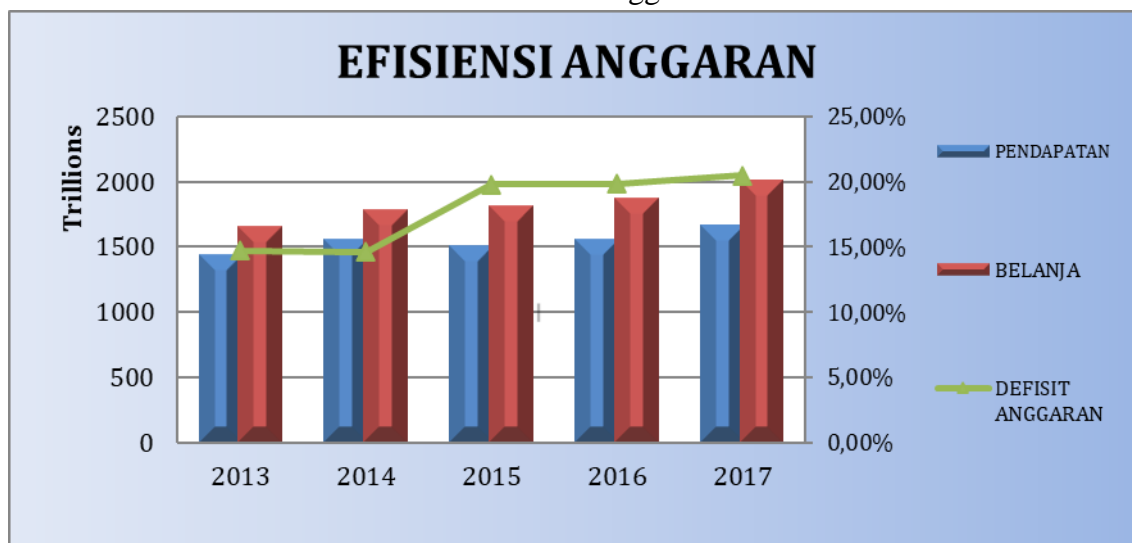
Tabel 3 indikator Efisiensi Anggaran

Sangat Efisien: 0% - 60%	Cukup Efisien: 80% - 90%	Tidak Efisien: >100%
Efisien: 60% - 80%	Kurang Efisien: 90%-100%	

Dari indicator tersebut, dapat di simpulkan bahwa penggunaan Anggaran tidak efisien, hal ini di karenakan, karna melihat besarnya belanja yang di dikeluarkan jauh lebih besar dari kapasitasnya atau sumber pendanaanya dan juga dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun anggaran kita makin tidak Efisien karna semakin tinggi belanja

yang di keluarkan namun pendapatan tidak berubah signifikan, deficit semakin melebar tiap tahunnya.

Grafik 3 Efisiensi Anggaran



jika dilihat tingkat ketidak efisiensinya anggaran, dari 2013-2017 tidak menunjukkan adanya efisiensi anggaran, karna deficit yang terjadi terus melebar dan di 2017 menjadi tahun anggaran sangat deficit mencapai 20 persen deficit anggaran, dan perubahan tren deficit yang sangat tajam terjadi mulai tahun 2015.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari pertumbuhan sumber penerimaan melalui Pajak yang tumbuh rata rata 7% dan berkontribusi 79persen dalam penerimaan Negara khususnya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar 96% dari penerimaan perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah berkontribusi 20 persen dari penerimaan Negara namun pertumbuhannya tumbuh dengan dengan tidak stabil (fluktuatif) dari tahun ketahun namun sudah berkontribusi dengan cukup baik.
2. Bahwadan defisit yang terus melebar dari tahun 2013-2017 rata rata 18 persen pertahun yang artinya belanja melebihi 100 persen dari kapasitas anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. (2001). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA. 1st ed.

- yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hidayatullah, Sjarif. (2016). SUMBER PENERIMAAN NEGARA. 2016. [https://www.academia.edu/26416240/\\_SUMBER\\_PENERIMAAN\\_NEGARA](https://www.academia.edu/26416240/_SUMBER_PENERIMAAN_NEGARA)
- Ikhsan, Surya Leksmna, and Amri Amir. (2016). “ANALISIS STRUKTUR PAJAK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RASIO PAJAK DI INDONESIA.” *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* Vol. 3 (4): 195–208.
- Intansari, Mira, Dwi Herwiyanti, Ratna, Mukhammad Alfian Khakim, And Arif Riska Nurcahyo. (2016). MAKALAH DESAIN PENELITIAN KUANTITATIF DESKRIPTIF.” surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Kementrian keuangan. (2013). DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA. Edited by Purwiyanto. *Buku Litera*. 2nd ed. Vol. 1. kementrian keuangan.
- Lewa, Megalani, Linjtje Kalangi, and Winston Pontoh. (2018). “ANALISIS PERUBAHAN TARIF PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21” 13 (3): 244–53.
- Oktaviani, Rachmawati Meita, Pancawati Hardiningsih, and Ceacilia Srimindari. (2017). KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMEDIASI DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN.” *Jurnal Akuntansi* 21 (2): 333. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>.
- Putri, Olivia Harisma. (2018). “PENERAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENERBITAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR PILIHAN,” 16.
- Riawan Tjandra. (2006). “HUKUM KEUANGAN NEGARA.” 2006. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LORPCu68v1EC&oi=fnd&pg=PA40&dq=pengertian+keuangan+negara&ots=sueeWBF4QQ&sig=p2D\\_Xcg3hYvMFJLhrBB933RToYA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LORPCu68v1EC&oi=fnd&pg=PA40&dq=pengertian+keuangan+negara&ots=sueeWBF4QQ&sig=p2D_Xcg3hYvMFJLhrBB933RToYA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Sari, Dwi Nofita, Sri Mintarti, and Salmah Pattisahusiwa. (2018). “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA” 15 (1): 40.
- Teen, Elfan. (2016). “Modul 2 KONSEP & STRUKTUR APBN.” In *Sistem Operasi Teknik Informatika Universitas Janabadra.*, 5.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. 2003. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA.” In *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Wijayanti, Amalia. (2015). “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA :” *Universitas Diponegoro Semarang*, 1–66.

Yuliani, Sofia Dwi, Kadarisman Hidayat, and Topowijono. (2015). “ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH ( Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1 (1): 3.